



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman  
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	23 April 2024	Media	khazanah
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	suger/ant

Harian  
**KHAZANAH**  
*Menebar Kebajikan*

### KLIPING KORAN

HARI : SELASA  
TANGGAL : 23 APRIL 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TOKOH MASYARAKAT AMBIL SUARA

# Penunjukan Pj. Walikota Pariaman Masih Saja Dipersoalkan OPD

Pariaman, Khazanah - Meskipun penunjukan Pejabat Walikota Pariaman Roberia sudah beberapa bulan berlalu, ternyata masih juga yang "mencikarainya", sehingga tokoh masyarakat Kota Pariaman Alwis Ilyas ikut ambil suara menjelaskan.

Menurut Alwis Ilyas, penunjukan Pejabat Walikota Pariaman Roberia itu berdasarkan pasal 201 Undang-undang Pilkada, untuk mengisi kekosongan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah yang habis masa jabatannya.

"Artinya, kehadiran Pj Wako Pariaman adalah berdasarkan keputusan Kemendagri, dan itu harus diterima oleh masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemko Pariaman. Jadi suka dan tidak suka OPD harus dapat menerima kehadiran Pj Wako itu," ujar Alwis Ilyas, Senin (22/4).

Jadi prinsipnya, tambah dia, penunjukan pejabat ini sudah di atur dalam Undang-undang dan tak perlu dipermasalahkan lagi.

Untuk menentukan seseorang ini memiliki kompetensi atau tidak, sebut

dia, berdasarkan kajian dan pertimbangan tim pemerintah pusat dan hasil akhirnya menjadi keputusan Mendagri dan Presiden.

"Jadi siapapun yang menjadi pemimpin dan menjadi imam di lingkungan Pemko Pariaman harus diikuti," sebut dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Bulyandi menyebutkan, pihaknya cukup respon dalam hal ini, dibuktikan dengan memanggil OPD dan Pj Wako untuk hearing.

"DPRD telah menggelar hearing bersama OPD pada Jumat 19 April dan Pj Wako pada hari ini Senin 22 April 2024 dengan hasil akan kami tuntaskan segera menggelar sidang di lingkungan Legislatif secepatnya."

Ia menyebutkan, beberapa OPD di lingkungan Pemko Pariaman merasa tidak nyaman dalam bekerja sama dalam melakukan kegiatan terhadap kinerja mereka di Pemko Pariaman, sehingga OPD bersurat ke Mendagri.

"Surat OPD yang dilayangkan ke Mendagri terkait

